

# ANALISIS PERANAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Faisol  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Nusantara PGRI Kediri  
[faisol\\_hambali@yahoo.co.id](mailto:faisol_hambali@yahoo.co.id)

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memastikan relevansi Teori Pertumbuhan Klasik Neo Solow Swan dalam analisis pertumbuhan ekonomi di negara berkembang belakangan ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran belanja pemerintah meliputi dampak belanja gaji terhadap inflasi, belanja kesehatan, belanja pendidikan, dan belanja infrastruktur terhadap investasi, dampak investasi dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel untuk 32 propinsi dalam periode 2012-2017 di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain Bank Indonesia, BPS, World Bank dan DJPK. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan estimasi persamaan simultan dengan pendelatan 3SLS (*Three Stage Least Square*) dengan bantuan software Aplikasi STATA 14

Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan fiskal seperti menaikkan belanja gaji antar propinsi di Indonesia adalah kebijakan yang tidak perlu dikawatirkan pada inflasi, kenaikan belanja gaji memiliki kecenderungan mempengaruhi konsumsi masyarakat hanya sebatas keinginan untuk konsumsi (*willing to pay*). Kemudian kebijakan fiskal seperti menaikkan belanja modal bidang kesehatan bisa menjadi kebijakan yang dianggap mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya sehingga dapat memberikan stimulus terhadap peningkatan investasi, namun menaikkan belanja modal bidang pendidikan dan bidang infrastruktur adalah menjadi hal yang perlu lebih dipertimbangkan dalam alokasi dan fungsinya agar kedepan mampu memberikan stimulus terhadap peningkatan investasi. Hasil juga menunjukkan bahwa peningkatan investasi baik berasal dari dalam maupun dari luar negeri menjadi hal yang sangat penting dan perlu untuk ditingkatkan dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di setiap propinsi di Indonesia. Selanjutnya, hasil penelitian ini memberikan justifikasi teori pertumbuhan Solow Swan yang dikembangkan oleh Olsson (2010) bahwa pola pemikiran neoklasik masih dapat digunakan sebagai analisis peranan pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kata kunci: peran belanja pemerintah, inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, 3SLS

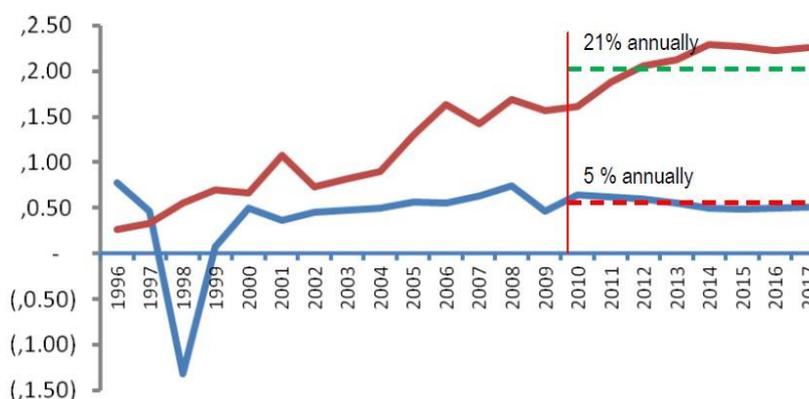
## 1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi yang sangat penting untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan menjadi salah satu tujuan utama dari berbagai kebijakan pemerintah (Sharipov, 2016; Akinboade & Kinpack, 2015; Kanayo, 2013). Alasannya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai faktor penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat (Sharipov, 2016). Pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi pengangguran dengan menciptakan tingkat pekerjaan yang lebih tinggi (Akinboade and Kinpack, 2015) serta mengurangi kemiskinan di suatu negara dengan meningkatkan pendapatan perkapita (Sasmal and Sasmal 2016). Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan produktivitas tenaga kerja yang meningkatkan pendapatan yang kemudian mendorong pada konsumsi dan investasi yang lebih tinggi (UNDP 2010). Pada gilirannya, peningkatan investasi menciptakan akumulasi modal, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Kanayo 2013).

Namun, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi masih menjadi tantangan dibanyak negara. Data menunjukkan bahwa sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998, kemudian krisis keuangan tahun 2008, pencapaian pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi sebagian besar negara termasuk negara-negara berkembang (IMF, 2015). Arus masuk modal menurun, dan sebagian besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah telah dialaminya (Maurice Obstfeld 2016). Situasi tersebut mengakibatkan tekanan-tekanan ekonomi di sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, sebagaimana dipaparkan dalam (IMF 2015), dimana di Era sebelum krisis (1997-1998), pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dengan rata-rata 6,8%, namun setelah itu pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 5.04 atau selalu dibawah 6% (IMF 2015, BPS 2018). Fakta ini dapat dikatakan bahwa Pasca krisis 1988, pertumbuhan ekonominya tidak mampu melebihi era sebelum krisis.

Kemudian, jika melihat trend perkembangan share anggaran belanja menunjukkan peningkatan secara terus menerus. Misalnya dalam periode 2010-2017 rata-rata peningkatan belanja pemerintah per tahun 21% (Gambar 1). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah yang cukup signifikan, cenderung belum dapat menerjemahkan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berarti. Kondisi ini juga bisa dikatakan ada kecenderungan peran pemerintah kurang optimal untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena selama 10 tahun lebih pertumbuhan ekonomi belum dapat atau bahwa tidak dapat melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum krisis. Bahkan data yang ditemukan menunjukkan bahwa peringkat Indonesia adalah masih diantara negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah di dunia (World Bank 2017). Selain itu, beberapa ekonom mengeksplorasi bahwa peningkatan belanja negara yang rata-rata 50% per tahun dalam periode 10 tahunan nampak tidak diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 1**  
**Perkembangan Anggaran Belanja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**



Sumber: BPS, DJPK, diolah (2019)

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dianggap penting dilakukan pengamatan dan penelitian tentang analisis peran belanja pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di

Indonesia. Secara umum, untuk mengetahui peran belanja pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal ini terdiri dari dua jenis anggaran belanja, yaitu belanja langsung yang disebut juga belanja untuk investasi dan belanja tidak langsung atau disebut juga belanja aparatur. Di tingkat pemerintah propinsi dan kabupaten / kota direfleksikan juga dengan anggaran belanja, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Terkait dua jenis anggaran belanja tersebut, (Próchniak 2011), (Raisová and Ďurčová 2014) menyatakan bahwa anggaran belanja dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dua perspektif yaitu: *Pertama*, dari perspektif permintaan (*aggregate demand*), bahwa belanja gaji, misalnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa dalam perekonomian, alasannya secara umum belanja tersebut digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, atau meningkatkan daya beli. Peningkatan daya beli adalah salah satu variabel yang menyebabkan peningkatan terhadap permintaan dalam perekonomian. Apabila pendapatan masyarakat meningkat bukan untuk konsumsi tapi sebagian dari pendapatannya untuk saving, maka itu juga bisa menjadi investasi. Peningkatan investasi dapat mempercepat akumulasi kapital yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan argumennya (Dutt 2006) menyatakan pertumbuhan ekonomi dapat diubah oleh guncangan permintaan yang besar, karena meningkatnya pengembalian dan efek histeresis di pasar tenaga kerja dan kendala neraca pembayaran. Temuan (Hartley and Whitt 2003) menunjukkan juga bahwa guncangan permintaan permanen atau sementara telah menjadi sumber dominan varian dalam pertumbuhan output di Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Belanda, AS selama era pasca perang. Di negara-negara Eropa terbesar, Jerman, guncangan permintaan menyumbang 76 persen dari varians pertumbuhan output, hanya menyisakan 24 persen untuk guncangan pasokan.

*Kedua adalah dari sisi produksi (aggregate supply)*. Secara umum, diakui bahwa belanja modal adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas sumber daya, alasannya secara umum belanja modal digunakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, dimana ketiga bidang tersebut merupakan prioritas sebagai perwujudan peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan pelayanan pendidikan berkualitas, penyediaan layanan kesehatan, dan fasilitas social dan umum yang layak. Peningkatan kapasitas sumber daya tersebut menyebabkan aktifitas produksi lebih efisien, lebih cepat dan lebih murah yang mendorong terciptanya investasi, peningkatan investasi akan menciptakan akumulasi modal yang dapat memicu output perekonomian. Hal tersebut juga ditegaskan oleh (Laopodis 2010) bahwa peningkatan investasi melalui sisi produksi akan menciptakan akumulasi modal, yang merupakan salah satu pendorong utama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan dianggap sebagai cara peningkatan transfer teknologi dan informasi (Kanayo, 2013; Fedderke & Romm, 2006; Bhanoji Rao, 2001). Pernyataan yang sama dijelaskan oleh (Stephen Gitahi Njuru et al, 2014) dalam analisisnya bahwa peningkatan kapasitas sumber daya (misalnya perbaiki infrastruktur seperti jalan raya, bangunan gedung pendidikan, gedung

kesehatan, kantor-kantor pemerintah dan lainnya), menyebabkan aktifitas produksi lebih efisien, lebih cepat dan lebih murah yang mendorong terciptanya investasi.

Sementara itu, dipandang dari sudut teori ekonomi, terkait dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih menunjukkan perbedaan pandangan, seperti yang dijabarkan oleh (Ampah and Kotosz 2018) bahwa dalam dekade tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian bagi banyak pembuat kebijakan dan tentang pengeluaran pemerintah juga masih diperdebatkan apakah itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Di Banyak negara, secara umum pengeluaran pemerintah digunakan sebagai kebijakan fiskal, namun pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tetap dipertanyakan, yaitu oleh dua hipotesis ekonomi yang telah diuji dengan baik dan telah digunakan oleh analisis ekonomi sebagai dasar untuk memperdebatkan pengaruh pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu hukum Wagner dan hipotesis Keynesian (Dogan and Tang 2006) ; (Shafuda, 2015); dan (Odhiambo 2015).

Dalam (Dogan and Tang 2006) memaparkan Hukum Wagner merupakan model yang menunjukkan pengeluaran pemerintah bersifat endogen terhadap pertumbuhan ekonomi dan ada kemungkinan jangka panjang pada pengeluaran publik untuk meningkatkan secara relatif terhadap sejumlah pendapatan nasional agregat seperti produk domestik bruto (PDB). Menurut Wagner (1883) dalam (Okoh 2015) bahwa pengeluaran pemerintah merupakan faktor endogen atau hasil, tetapi bukan merupakan penyebab pembangunan ekonomi. Secara matematis, hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai,  $G_t=(Y_t)$ , di mana  $G$  menggambarkan pada ukuran sektor publik yang mencerminkan tingkat pengeluaran pemerintah dan  $Y$  berarti tingkat kinerja perekonomian atau pertumbuhan ekonomi. Dengan kata sederhana, hukum Wagner menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah karena pertumbuhan ekonomi (Okoh 2015).

Namun argument lain seperti (Charles R. Nelson, 1982); (Loizides & Vamvoukas, 2005; Shafuda, 2015); (Odhiambo 2015) dalam karyanya mengupas hipotesis Keynesian bahwa pengeluaran pemerintah yang ekspansif mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dianggap sebagai kekuatan eksogen yang mengubah output agregat. Alasannya adalah kebijakan fiskal yang proaktif merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk merangsang kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi (Shafuda 2015). Selain itu bahwa pengeluaran pemerintah dianggap sebagai alat kebijakan ekonomi utama dari demand yang efektif dan ketika pengeluaran pemerintah meningkat, produksi juga meningkat, dan ini mengarah pada peningkatan permintaan agregat, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) (Charles R. NELSON 1982); (Odhiambo 2015).

Selain dua hipotesis tersebut, (Carboni and Medda 2011); (Sharipov 2016); (Chirwa and Odhiambo 2018) dalam analisisnya memaparkan bahwa sumber-sumber percepatan pertumbuhan ekonomi dapat merujuk pada analisis model pertumbuhan neoklasik (Solow 1956b). Dalam karyanya menjelaskan bahwa perubahan tingkat pertumbuhan jangka panjang didorong oleh pertumbuhan persediaan modal, tingkat pertumbuhan tenaga kerja (populasi), dan tingkat

kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen. Mereka menjelaskan bahwa persediaan modal merupakan determinan output perekonomian yang sangat penting, karena persediaan modal dapat berubah sepanjang waktu, kemudian berubahnya ke arah pertumbuhan ekonomi. Investasi dan depresiasi merupakan dua kekuatan yang dapat mempengaruhi perubahan persediaan modal. Investasi (*investment*) mengacu pada pengeluaran anggaran untuk perluasan bisnis dan mesin-mesin baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Sedangkan, depresiasi (*depreciation*) mengarah pada pemanfaatan modal, dan hal itu mengakibatkan persediaan modal menjadi berkurang. Model pertumbuhan Solow dalam (Olsson 2010) menyatakan penambahan modal untuk investasi akan selalu positif apabila nilai kemanfaatan investasi tersebut lebih besar daripada nilai depresiasinya, begitu sebaliknya apabila nilai kemanfaatan investasi tersebut lebih kecil dari nilai depresiasinya, atau bahkan tetap, maka akan berdampak negatif terhadap tingkat output perekonomian. Model tersebut memaparkan bahwa yang dapat *mengoffset* atau mengganti tingkat depresiasi dari persediaan modal adalah peningkatan investasi dengan pemanfaatan kemajuan teknologi modern (Sharipov 2016).

Beberapa bukti empiris yang telah sedang berkembang dalam 20 tahun terakhir, dan sejumlah besar literatur tentang dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa menunjukkan bukti dukungan yang tegas. Ketidaktegasan tersebut seperti yang dijelaskan dalam penelitiannya (Slemrod, Gale, and Easterly 1995) adanya ketidakjelasan klasifikasi program pengeluaran untuk pembangunan, kemudian (Barro 1992), (Milesi-Ferretti and Roubini 1998) bahwa peningkatan belanja pemerintah cenderung ke arah perlambatan pertumbuhan pendapatan, hasil pengamatannya memunculkan hipotesis bahwa ukuran pemerintah memiliki dampak negatif pada kinerja ekonomi. selanjutnya (Martin Zagler 2003) terdapat sedikit atau bahkan hampir tidak ada dampak belanja pemerintah (kebijakan fiskal) terhadap pertumbuhan ekonomi, (Nijkamp and Poot 2004) membuktikan hubungan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi agak lemah, dan (Dudzeviit, Liuvaitien, and Simelyt 2017) menemukan pengeluaran pemerintah tidak jelas terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ini bisa positif atau negatif tergantung pada negara-negara yang termasuk dalam sampel penelitian, periode estimasi dan variabel yang mencerminkan ukuran sektor publik.

Mempertimbangkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini bermaksud mengembangkan model pertumbuhan neoklasik Solow (Solow 1956a) dengan memasukkan faktor-faktor produktif lainnya selain modal dan tenaga kerja, sebagaimana telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya seperti (N. Gregory Mankiw, David Romer 1992) yang menekankan pentingnya menambahkan modal manusia ke dalam model Solow, (Walter Nonneman and Patrick Vanhoudt 1996) yang memerankan human capital dan physical capital dalam perspektif pertumbuhan endogen, (Bajo-Rubio 2000) yang memasukkan peran pemerintah melalui modal publik dan transfer secara konseptual yang menganggap pola pikir pertumbuhan Solow akan mampu menjelaskan perbedaan lintas-negara dalam tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. (Kwok and Kwok 2007); (Laopodis 2010) menegaskan percepatan

perubahan output perekonomian, sangat perlu adanya peningkatan investasi baik investasi publik maupun investasi swasta,

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini dianggap perlu dilakukan, selanjutnya dipilih topik yang lebih spesifik yang dirumuskan dalam judul “Analisis peran pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Topik ini bermaksud menerapkan dan membangun teori pertumbuhan Neo Klasik Solow melalui belanja gaji, belanja modal bidang kesehatan, pendidikan dan bidang infrastruktur yang merefleksikan peran pemerintah dan beberapa variable-variabel ekonomi meliputi inflasi, pertumbuhan investasi, konsumsi swasta, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan anggaran belanja daerah. Maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak belanja gaji terhadap inflasi, belanja bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan investasi, dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara sistematis, penelitian ini disusun sebagai berikut: tinjauan teori dan literatur yang relevan dipaparkan dalam Bagian 2; Bagian 3 menjelaskan data dan model penelitian, termasuk variabel penelitian, spesifikasi model; Bagian 4 menyajikan metode dan estimasi pemilihan model; Bagian 5 memberikan hasil dan pembahasan. Bagian terakhir menyajikan simpulan dan rekomendasi.

## 2. Kajian Teori

Dengan maksud memberikan pemahaman yang lebih baik, kami memberikan landasan teoritis terkait hubungan antara belanja pemerintah terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dijelaskan dengan tegas dalam (Mankiw 2010) bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara dipengaruhi oleh stok modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Kemudian Solow (1956) dalam (Olsson 2010) memaparkan modal adalah faktor penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Model Solow menjelaskan saving adalah penentu penting pada kondisi mapan di mana ekonomi suatu negara akan memiliki stok modal yang besar dan tingkat output yang tinggi. Sehubungan dengan konsep hubungan antara belanja pemerintah, saving dan pertumbuhan ekonomi Gambar 2 menggambarkan konsep secara skematis.

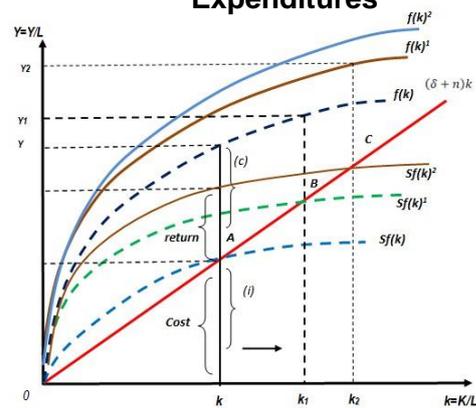
Untuk menjelaskan Gambar 3, (Olsson 2010) memaparkan belanja pemerintah dinyatakan dalam bentuk kurva  $f(k)^2$ , itu menggambarkan penambahan modal publik dapat mempengaruhi perubahan modal dan output ekonomi. Dampak peningkatan modal publik diilustrasikan dengan menggeser output dari titik  $y^1$  ke  $y^2$  dan perubahan modal dari titik  $k_1$  ke  $k_2$ . Perubahan ini disebabkan oleh peningkatan investasi yang lebih besar dari nilai depresiasi. Situasi ini bisa sebaliknya, artinya jika nilai manfaat investasi lebih kecil dari nilai depresi, itu akan berdampak negatif pada output ekonomi. Menurut (Olsson 2010) menyatakan tingkat depresiasi investasi atau biaya dana dari modal akan mempengaruhi perubahan output ekonomi dan teknologi merupakan penentu utama penting dari pertumbuhan output. Situasi ini sesuai dengan temuan (Sharipov 2016)

bahwa sesuatu yang dapat mengimbangi atau meng offset tingkat penyusutan adalah teknologi canggih. Ilustrasi ini mencerminkan hubungan peningkatan pengeluaran pemerintah yang dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan output (Sharipov, 2016)

Beberapa penelitian sebelumnya seperti , (Hussein and Benhin 2014), (Emmanuel Nkoa Onggo and Sciences 2014), (Sunny Lbe O 2016), (Daniel Francois Meyer, Tebogo Manete 2017), (Seshaiah, Reddy, and Sarma 2018) yang menyatakan negara dengan penambahan investasi yang lebih dalam dan lebih luas dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hasil yang sama seperti (Bhanoji Rao, 2001), (Lorena Cakerri. Migena Petanaj. Oltiana Muharremi, 2014), (Chirwa & Odhiambo, 2016) yang menganalisis penentuan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan negara maju.

Hasil penelitian menyatakan peningkatan modal fisik, modal manusia dan kebijakan fiskal dan moneter, demografi, dan faktor teknologi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

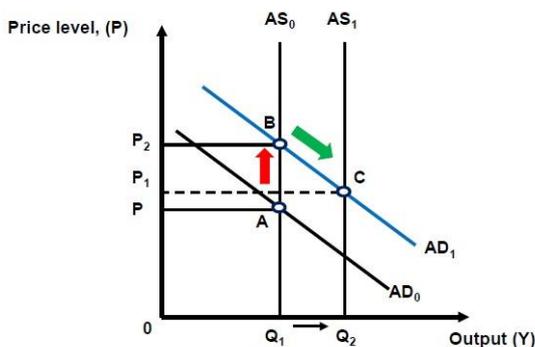
**Gambar 2**  
**The Solow Growth Model and Government Expenditures**



Sumber: Olsson (2010)

Kemudian, teori terkait hubungan belanja pemerintah terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah teori Agregate Supply and Agregate Demand (Richard T. Froyen 2013).

**Gambar 3. Peran belanja terhadap harga dan output**



Sumber: Richard T. Froyen (2013)

Untuk memahami Gambar 3, beberapa ekonomi seperti (Raisová and Ďurčová 2014), (Hartley and Whitt 2003), (Dutt 2006) menyatakan pengaruh interaksi permintaan dan penawaran terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah suatu asumsi dasar yang didokumentasikan oleh banyak publikasi ekonomi makro, dan dianggap mampu untuk menganalisa pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan misalnya peningkatan belanja pemerintah, ekspansi jumlah uang beredar, peningkatan konsumsi masyarakat karena peningkatan pendapatan perkapita, dan net ekspor (surplus neraca perdagangan), variabel-variabel tersebut dianggap mampu menyebabkan peningkatan terhadap permintaan barang dan jasa dalam perekonomian.

Hal tersebut dapat dianalisis melalui kurva aggregate demand (AD) dan aggregate supply (AS) bahwa awal perekonomian dimulai dari titik keseimbangan A atau kurva  $AD_0$ , ketika terjadi ekspansi belanja pemerintah misalnya belanja gaji, peningkatan tersebut dapat berdampak dan mempengaruhi harga menjadi lebih tinggi yaitu dari titik A ke titik B atau level P ke level  $P_2$ , beberapa waktu kemudian, karena adanya peningkatan pendapatan misalnya insentif, gaji atau sejenisnya, maka peningkatan ini dapat memengaruhi tekanan daya beli (dinyatakan dalam kurva  $AD_1$ ), peningkatan daya beli ini memicu produsen untuk memproduksi dan menghasilkan barang jasa ekonomi yang melimpah, keadaan ini dapat menggerakkan titik  $Q_1$  ke  $Q_2$  yang berarti output meningkat dan kemudian diikuti penurunan harga yaitu titik B ke titik C, yang berarti harga lebih rendah. (Klenow and Malin 2010) menjelaskan perubahan harga ini menunjukkan tidak adanya sticky price atau tidak adanya *money illusion*. Fenomena ini merefleksikan hubungan peningkatan belanja pemerintah yang dapat mempengaruhi perubahan tingkat harga barang jasa dan output perekonomian.

Berdasarkan kajian teori dan empiris yang dirujuk dalam penelitian ini, dapat diyakini bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dengan dua sisi faktor yaitu *demand side* dan *supply side*, sebagaimana dijelaskan oleh (Próchniak 2011), dan juga (Gunarto, Sentri, and Said 2018) yang menyatakan bahwa dua sisi tersebut memiliki cakupan yang sama, (misalnya investasi menyiratkan efek sisi permintaan dan sisi penawaran). Kedua sisi faktor tersebut dapat dimasukkan dalam analisis sumber pertumbuhan PDB. Di satu sisi, faktor sisi penawaran (*supply side*) terutama mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang: dengan kata lain tingkat pertumbuhan potensi PDB. Kelompok faktor ini meliputi, antara lain, input untuk produksi (modal fisik, modal manusia, tenaga kerja dan teknologi) serta variabel yang mewakili lingkungan kelembagaan dan kemajuan pasar atau reformasi struktural. Di sisi lain, faktor sisi permintaan (*demand side*) adalah elemen permintaan agregat dan memberikan dampak jangka pendek pada tingkat pertumbuhan ekonomi.

### 3. Data dan Model Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menguji dan menjelaskan dampak belanja kesehatan, pendidikan dan belanja infrastruktur terhadap investasi, dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian, dampak belanja gaji terhadap inflasi, dan dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan bentuk data panel (*pooled-data*) yaitu terdiri dari data runtut waktu (*time series data*) yaitu sekumpulan data yang relevan selama periode 2012-2017 dan data antara tempat atau ruang (*cross section*) yaitu 32 propinsi di Indonesia. Adapun data yang dikumpulkan di masing-masing propinsi yang dijadikan variabel penelitian ini, meliputi: (1) pertumbuhan ekonomi, (2) total belanja (APBD) (3) belanja gaji, (4) investasi, (5) inflasi, (6) belanja modal bidang pendidikan, (7) belanja modal bidang kesehatan, (8) belanja bidang infrastruktur, (9) pengeluaran konsumsi dan (10) pendapatan perkapita. Data-data tersebut diperoleh dan diunduh dari beberapa publikasi, meliputi SEKI (Bank Indonesia) dengan alamat web <https://www.bi.go.id/id/statistik/metadataseki/>, Badan Pusat Statistik (BPS)

dengan alamat [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPK) dengan alamat di <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> dan beberapa sumber situs web lain yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam konteks ini, kami menerapkan analisis regresi simultan dalam pendekatan Three Stage Least Square (3SLS). Menurut Koutsoyiannis (1977) model persamaan simultan adalah model yang dapat menjelaskan model yang mengandung lebih dari satu persamaan, dan setiap persamaan tidak dapat mengukur parameter tanpa mempertimbangkan persamaan lain dalam model. Dalam model simultan, ada dua jenis variabel, yaitu variabel endogen yang merupakan variabel yang nilainya diukur dan ditentukan dalam model, dan variabel yang ditentukan sebelumnya adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model Gujarati, Damodar N (2012). Untuk mengetahui peran pemerintah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan persamaan simultan dengan model persamaan penelitian sebagai berikut:

- a. **Model (1)** pengaruh belanja gaji, pendapatan perkapita dan konsumsi terhadap inflasi

$$Inflasi_{it} = \alpha_i + \alpha_1 B\_Gaji_{it} + \alpha_2 Perkapita_{it} + \alpha_3 Konsumsi_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

- b. **Model (2)** pengaruh belanja modal bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur dan inflasi terhadap investasi

$$Investasi_{it} = \beta_i + \beta_1 B\_Kes_{it} + \beta_2 Pend_{it} + \beta_3 B\_Infras_{it} + \beta_4 Inflasi_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3)$$

- c. **Model (3)** pengaruh inflasi, investasi, dan anggaran belanja pendapatan dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi

$$Growth_{it} = \beta_i + \beta_1 Inflasi_{it} + \beta_2 Investasi_{it} + \beta_3 APBD_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Dimana:

- Growth = adalah pertumbuhan ekonomi
- Inflasi = adalah laju Inflasi (dengan pengukuran  $IHK_t - IHK_{t-1} / IHK_{t-1} \times 100\%$ )
- Investasi = adalah pertumbuhan investasi (dengan pengukurannya adalah  $PMTB_t - PTMB_{t-1} / PTMB_{t-1} \times 100\%$ )
- B\_Gaji = adalah rasio total anggaran belanja gaji terhadap PDRB ADHB
- APBD = adalah total anggaran pendapatan dan belanja daerah diukur dengan menggunakan rasio total belanja dengan PDRB ADHB
- B\_Pend = merupakan total belanja bidang pendidikan yang diukur dengan menggunakan rasio total belanja pendidikan dengan PDRB ADHB
- B\_Kes = merupakan total belanja bidang kesehatan yang diukur dengan menggunakan rasio total belanja pendidikan dengan PDRB ADHB
- B\_Infra = merupakan belanja bidang infrastruktur yang diukur dengan menggunakan rasio total belanja bidang infrastruktur dengan PDRB ADHB
- Konsumsi = merupakan rasio total pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga dan konsumsi akhir lembaga non profit terhadap total PDRB
- Perkapita = adalah pendapatan perkapita yang diukur dengan total PDRB ADHB dibagi dengan jumlah penduduk
- i = menunjukkan provinsi
- t = menunjukkan tahun pengamatan (2012-2017)
- $\epsilon_{1it}$  dan  $\epsilon_{2it}$  = menunjukkan disturbance,  $\alpha_i$  dan  $\beta_i$  = adalah konstanta (*intercep*) provinsi i;

#### 4. Metode dan Estimasi Pemilihan Model

Analisis estimasi persamaan simultan dengan pendekatan 3SLS dalam penelitian ini adalah menggunakan data panel atau dapat disebut 3SLS data panel yaitu analisis Three Stage Least

Square dengan kombinasi antara data *cross section* dan data *times series*. Data panel berkarakter *cross section* adalah data yang berdimensi individu, sedangkan data panel berkarakter *time series* adalah data yang berdemensi waktu. Kedua data tersebut baik yang berkarakter *cross section* maupun *time series* memiliki cara uji yang berbeda. Pada umumnya, pengujian persamaan simultan dengan data panel dilakukan melalui 3 uji yaitu, Uji Chow adalah tes awal yang berfungsi untuk menentukan antara model Ordinary Least Square dan Fixed Effect. Uji Hausman adalah untuk menentukan antara fixed effect model dan random effect model. Ketiga, Uji LM (*Langrage Multiplier*) digunakan untuk memilih antara fixed effect model dan random effect model. Selanjutnya, pengujian persamaan simultan dengan data panel dengan karakteristik times series adalah melalui uji stasioneritas (Gujarati & Porter, 2009). Berikut adalah hasil estimasi model persamaan simultan data panel.

**Tabel 1**  
**Hasil estimasi pemilihan model antara Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect**

Equation	Chow Test Result		Hausman Test Result	LM Test Result	Justification
	Prob> F		Prob > chi2	Prob>chibar2	
Equation 1	0.9993		0.4716	1.0000	Common Effect
Equation 2	0.0039		0.7819	0.0021	Random Effect
Equation 3	0.0000		0.0021	0.0000	Random Effect

Source: STATA, diolah (2019)

Berdasarkan pada hasil estimasi pemilihan model di (Tabel 1) menunjukkan: Persamaan (1) dinyatakan cenderung ke *Common Effect Model*. Hasil tersebut dibuktikan melalui Uji LM dengan nilai Prob> Chibar2 = 1.000 > alpha (0,05). Hasil Uji LM menunjukkan bukti kuat bahwa persamaan (1) masuk dalam Model Common Effect. Persamaan (2) dinyatakan cenderung ke *Random Effect Model*. Hasil tersebut didasarkan pada hasil uji LM dengan nilai Prob> chibar2 = 0,0021 < alpha (0,05). Hasil Uji LM ini memberikan bukti kuat bahwa persamaan (2) dapat dinyatakan Model Random Effect. Persamaan (3) dinyatakan ke Random Effect Model. Hasil tersebut dibuktikan dengan melalui uji LM dengan nilai Prob> Chibar2 = 0.000 < alpha (0.05). Hasil uji LM ini memberikan bukti kuat bahwa persamaan (3) masuk ke Random Effect Model. Merujuk pada (Gujarati and Porter 2009) bahwa jika suatu persamaan memiliki kategori *random effect*, maka variabel dalam persamaan tersebut harus diuji stasioneritasnya, dan jika suatu persamaan dalam model cenderung atau memiliki kategori *fixed effect* atau *common effect*, maka tidak perlu diuji stasioneritasnya. Tarkait argument tersebut, berikut adalah hasil uji Stasioneritas.

**Tabel 4.2**  
**Hasil uji Stasioneritas**

Variabel	LLC (Levin, Lin & Chu)		Variabel	LLC (Levin, Lin & Chu)	
	t-statistic	probabilitas		t-statistic	probabilitas
Growth	-13.3521	0.0000	Konsumsi	-15.4418	0.0000
Investasi	-12.6757	0.0000	B_kesehatan	-7.03348	0.0000
Inflasi	-10.5503	0.0000	B_pendidkan	-7.88883	0.0000
Belanja gaji	-2.67582	0.0000	B_infrastruktur	-7.67779	0.0000
Perkapita	-3.40471	0.0000	Total abpd (apbdr)	-3.58330	0.0000

Sumber: Hasil analisis, diolah (2019)

## 5. Hasil dan Pembahasan

Setelah pengujian pemilihan model dilakukan dan sudah memunuhi asumsi analisis persamaan simultan dengan pendekatan 3SLS (Tree Stage Least Square), maka berikut adalah secara jelas menggambarkan hasil uji persamaan simultan pada Tabel 2

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Persamaan 3SLS**

Equation	Coef	Std.Err.	Z	P> z
<b>inflasi</b>				
<i>belanja_gaji</i>	-14.12975	19.14999	-0.74	0.461
<i>per_capita</i>	.0000891	.0000359	2.49	0.013
<i>konsumsi</i>	.010851	.0556674	0.19	0.845
<i>cons</i>	-.8995493	3.83523	-0.23	0.815
<b>Investasi</b>				
<i>belanja_bidang_kesehatan</i>	.0001006	.0000534	1.88	0.060
<i>belanja_bidang_pendidikan</i>	-.0000482	.0000318	-1.52	0.129
<i>belanja_bidang_infrastruktur</i>	.0000152	.0000178	0.85	0.394
<i>inflasi</i>	-.0067084	.0022929	-2.93	0.003
<i>cons</i>	.0703763	.0087205	8.07	0.000
<b>Pertumbuhah_ekonomi</b>				
<i>inflasi</i>	-.0003643	.0012992	-0.28	0.779
<i>investasi</i>	.6265277	.2313395	2.71	0.007
<i>apbdr</i>	-.1680461	.1216524	-1.38	0.167
<i>cons</i>	.0281738	.0113251	2.49	0.013
Endogenous variables	inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi			
Exogenous variables	belanja_gaji per_capita konsumsi belanja_bidang_kesehatan belanja_bidang_pendidikan belanja_bidang_infrastruktur apbdr			

Sumber: STATA, diolah (2019)

Berdasarkan pada hasil uji 3SLS, maka dapat menjawab tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak belanja gaji terhadap inflasi. Secara statistik, menunjukkan belanja gaji tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi, dimana dibuktikan dengan perolehan nilai *p-value* sebesar  $0.461 > \alpha (0.05)$ . Hal ini mengandung arti bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang belanja gaji belum tentu mempengaruhi laju inflasi. Kondisi ini dimungkinkan ketika kebijakan fiskal seperti menaikkan belanja gaji, ada kemungkinan dapat mempengaruhi perubahan harga menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, pada jangka waktu tertentu, karena ada peningkatan pendapatan misalnya kenaikan gaji, insentif dan sejenisnya, keadaan ini dapat mendorong daya beli, tekanan daya beli ini mampu mendorong para produsen untuk memproduksi dan menyediakan barang dan jasa ekonomi, maka output perekonomian bertambah dan meningkat. Dengan melimpahnya barang dan jasa tersebut menyebabkan harga turun (*lower price*). Secara singkat dapat dikatakan bahwa peran pemerintah melalui kebijakan fiskal seperti menaikkan belanja gaji belum tentu dapat mempengaruhi inflasi, atau dapat dikatakan bahwa belanja gaji hanya mampu mempengaruhi konsumsi masyarakat sebatas keinginan untuk konsumsi (*willing to pay*). Seperti dalam teori *Aggregate Demand* dan *Aggregate Supply* dalam (Parkin 2012) yang menggambarkan bahwa ketika pemerintah melakukan kebijakan fiskal misalnya menaikkan belanja gaji, peningkatan ini dapat mempengaruhi tingkat harga barang dan jasa ekonomi lebih tinggi dari sebelumnya, beberapa waktu, ketika terjadi peningkatan pendapatan seperti gaji, insentif dan sejenisnya, peningkatan ini mendorong daya beli, tekanan daya beli ini memicu para produsen untuk memproduksi dan menyediakan barang dan jasa ekonomi, kondisi ini menyebabkan output perekonomian meningkat, dengan melimpahnya barang dan jasa ekonomi akan diikuti penurunan harga. Maka, keadaan ini sejalan dengan (Klenow and Malin 2010) menjelaskan perubahan harga dalam ekonomi menunjukkan tidak adanya *sticky price* atau tidak adanya *money elusion*.

2. Bagaimana dampak belanja kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap investasi. Secara statistik, menunjukkan belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap investasi. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai *p-value* variable belanja bidang kesehatan sebesar  $0.060 < \alpha (0.10)$  dengan nilai koefisien bertanda positif sebesar .0001006. Hal ini mengandung arti bahwa peningkatan belanja bidang kesehatan mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya yang nilai kemanfaatannya besar untuk masyarakat pada umumnya, menyebabkan *cost* atau beban masyarakat menjadi lebih kecil, keadaan ini memberi stimulus peningkatan investasi. Peningkatan investasi ini dapat menciptakan proses akumulasi modal yang cepat sehingga dapat mempengaruhi persediaan modal bertambah. Namun peran belanja modal bidang pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi. Secara statistik, pernyataan tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai *p-value* variabel belanja bidang pendidikan sebesar  $0.129 > \alpha (0.05)$  dan ada kecenderungan negatif yaitu dengan melihat nilai koefisien sebesar (-.0000482). Hal ini berarti bahwa peningkatan belanja bidang pendidikan belum dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan investasi. Ketidaksignifikan ini berarti kebijakan fiskal bidang pendidikan belum dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya yang menstimulus peningkatan investasi, misalnya masih tingginya *cost* penyediaan ilmu pengetahuan, *cost* sumber-sumber energi yang masih tinggi, *cost* penyediaan teknologi dan logistic lainnya yang masih mahal, sehingga dengan mahalnya kapasitas sumberdaya tersebut dapat menghambat proses akumulasi modal, sehingga peran belanja pendidikan belum mampu mempengaruhi dan menstimulus pertumbuhan investasi. Demikian juga, peran belanja bidang infrastruktur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara statistik pernyataan tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai *p-value* variabel belanja bidang infrastruktur sebesar  $0.394 > \alpha (0.05)$  dengan nilai koefisien sebesar .0000152. Hasil ini berarti peran belanja bidang infrastruktur belum dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya yang murah, yaitu masih mahalnya biaya penyediaan pembangunan infrastruktur misalnya, jalan Kereta, Pelabuhan, Jalan Tol, Listrik, Bandara, bendungan, dan logistic lainnya. Dengan tingginya *cost* penyediaan infrastruktur tersebut menjadi hambatan peningkatan investasi, dan bisa menjadi sangat kecil memiliki peluang untuk perluasan usaha atau investasi bahkan sangat sulit untuk mengakumulasi modal, sehingga keadaan bisa menghambat proses akumulasi modal. Sehingga peran belanja infrastruktur belum mampu mempengaruhi dan menstimulus pertumbuhan investasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti (Akinlo and Oyeleke 2018), (Norashida Othman, Zulkornain Yusop, Gul Andaman 2018), bahwa belanja publik dapat menstimulus investasi. Kemudian, (Laopodis 2010) menyatakan dalam beberapa keadaan, pengeluaran publik, seperti pengeluaran infrastruktur bidang kesehatan dan pengeluaran umum lainnya menstimulus investasi.

3. Bagaimana dampak pertumbuhan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara statistik menunjukkan pertumbuhan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai *p-value* variable investasi sebesar  $0.007 < \alpha (0.05)$  dan dengan nilai koefisien bertanda positif sebesar .6265277. Hal ini mengandung arti

bahwa peningkatan investasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sebaliknya jika terdapat penurunan investasi dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan pemikiran teori neoklasik yang dikembangkan Olsson (2010) bahwa setiap tambahan investasi baru akan mempengaruhi perubahan persediaan modal, dan penambahan persediaan modal berarti juga pertumbuhan ekonomi. Jika cost (atau tekanan harga) dari investasi baru lebih kecil dari return maka menyebabkan persediaan modal bertambah. Baik Investasi dari sektor publik maupun dari sektor swasta memiliki dua nilai menurut pemikiran neoklasik yaitu nilai cost of fund (depreciation) karena tekanan harga dan nilai return. Semakin rendah cost of fund dari suatu investasi semakin cepat mendorong out perekonomian yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya seperti (Adams 2009), (Hussein and Benhin 2014), (Emmanuel Nkoa Onggo and Sciences 2014); (Sunny Lbe O 2016); (Daniel Francois Meyer, Tebogo Manete 2017), (Seshaiah, Reddy, and Sarma 2018) yang menyatakan Negara-negara dengan penambahan investasi yang lebih dalam dan lebih luas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, (Bhanaji Rao 2001), (Lorena Cakerri. Migena Petanaj. Oltiana Muharremi 2014), (Chirwa and Odhiambo 2016) menyatakan secara umum peningkatan modal fisik (*physical capital*), *human capital*, kebijakan fiskal dan moneter, demografi, dan faktor-faktor teknologi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Bagaimana dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara statistik menunjukkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. pernyataan tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai p-value variabel inflasi sebesar  $0.779 > \alpha (0.05)$  dengan nilai koefisien  $-0.0003643$ . Hal ini mengandung arti tingkat inflasi pada periode penelitian tidak berpengaruh pada perekonomian. Hasil ini menggambarkan inflasi merupakan salah satu kekuatan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut teori pertumbuhan neoklasik Solow dalam (Olsson 2010) bahwa inflasi dapat diterjemahkan sebagai *cost of fund* dalam kegiatan perekonomian, jika cost of fund atau *depreciation* dalam modal investasi lebih kecil dari *return* investasi maka secara signifikan dapat mendorong perubahan output perekonomian yang berarti juga pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Maka, hasil analisis tersebut merefleksikan pola pemikiran klasik, dimana jika  $sf(k)$  lebih besar daripada  $\delta k$ , maka rasio modal dan pekerja akan naik. Sebaliknya jika depresiasi sebegitu besar, dan diminishing return mengurangi manfaat marginal dari investasi pada modal baru yang  $sf(k) - \delta k$  maka  $k$  akan negative dan akan turun. Hasil ini sejalan dengan penelitiannya (Alexander 2010), (Attari and Javed 2013); (Behera 2014) yang menyatakan bahwa tingkat laju inflasi tidak ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan juga tidak hubungan kausalitas. Hasil penelitian lainnya (Akinsola and Odhiambo 2017) dalam analisisnya menemukan bahwa dampak inflasi pada pertumbuhan ekonomi bervariasi dari satu negara ke negara dan dari waktu ke waktu. (Vinayagathan 2013), (W. Madurapperuma 2016), (Mario Svirig 2017) menemukan bahwa laju inflasi menghambat pertumbuhan ekonomi ketika melebihi 5,43%.

## 6. Simpulan

Hasil menginformasikan bahwa menaikkan besaran kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah seperti belanja gaji, insentif, dan sejenisnya adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan, karena menaikkan belanja tersebut tidak memiliki kecenderungan mempengaruhi tingkat inflasi, bahkan dapat mendorong output perekonomian. Hal tersebut telah dibuktikan hasil analisis penitilian ini bahwa ketika ada peningkatan belanja gaji memang dapat mempengaruhi harga yang lebih tinggi, namun dalam beberapa waktu, dengan adanya peningkatan pendapatan akan menyebabkan daya beli meningkat, keadaan ini memicu para produsen untuk memproduksi dan menyediakan barang dan jasa ekonomi atas tekanan peningkatan daya beli, maka output bertambah dan meningkat, yang kemudian diikuti penurunan harga karena ketersediaan barang dan jasa ekonomi. Maka keadaan ini memberikan rekomendasi bahwa kebijakan untuk menaikkan belanja gaji merupakan hal yang tidak perlu dikhawatirkan, karena kebijakan tersebut selain tidak mempengaruhi laju inflasi, bisa juga dianggap menjadi salah satu kebijakan yang dapat mendorong kecepatan kegiatan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi meningkat.

Hasil memaparkan bahwa kebijakan fiskal seperti belanja modal bidang kesehatan merupakan belanja investasi yang dianggap mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya yang dapat menekan *cost* penyediaan kebutuhan kesehatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas seperti keadaan rumah sakit, dokter, tenaga medis, alat-alat kesehatan yang terbaru, dan logistik lainnya, sehingga peningkatan kapasitas sumberdaya ini dapat menstimulus pertumbuhan investasi, peningkatan investasi tersebut akan mempercepat proses akumulasinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun belanja bidang pendidikan merupakan belanja investasi yang dianggap belum mampu untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya, yang menekan *cost* penyediaan kebutuhan pendidikan, seperti tingginya *cost* untuk sarana prasarana pendidikan, tingginya *cost* penyediaan logistik seperti ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan sumberdaya lainnya. Demikian juga belanja bidang infrastruktur adalah salah satu belanja modal yang juga dianggap belum dapat menekan *cost* penyediaan kebutuhan infrastruktur seperti pembangunan jalan Kereta, Pelabuhan, Jalan Tol, Listrik, Bandara, bendungan, dan logistik lainnya. Penyediaan infrastruktur yang mengandung *cost* yang tinggi dapat menyebabkan biaya logistic menjadi sangat mahal, dampaknya menjadi daya saing menjadi rendah. Keadaan ini dapat menjadi hambatan terhadap peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menginformasikan bahwa menaikkan anggaran investasi bisa menjadi salah satu instrument untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini untuk menaikkan anggaran investasi bukan hanya berasal dari pengeluaran pemerintah (*public sector*) namun sektor swasta (*private sector*) juga sangat memiliki peran dalam meningkatkan investasi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan belanja pada sektor pemerintah, karena kemampuan keuangan negara sangat terbatas, jadi peran swasta baik dari dalam maupun luar negeri menjadi sangat penting.

## Daftar Pustaka

- Adams, Samuel. 2009. "Foreign Direct Investment, Domestic Investment, and Economic Growth in Sub-Saharan Africa." *Journal of Policy Modeling* 31 (6): 939–949. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2009.03.003>.
- Akinboade, Oludele Akinloye, and Emilie Chanceline Kinfack. 2015. "Financial Development, Economic Growth and Millennium Development Goals in South Africa." *International Journal of Social Economics* 42 (5): 459–479.
- Akinlo, Taiwo, and Olusola Joel Oyeleke. 2018. "Effects of Government Expenditure on Private Investment in Nigerian Economy (1980–2016)." *Emerging Economy Studies* 4 (2): 147–56. <https://doi.org/10.1177/2394901518795067>.
- Akinsola, F.A., and N.M. Odhiambo. 2017. "Inflation and Economic Growth: A Review of the International Literature." *Comparative Economic Research* 20 (3). <https://doi.org/10.1515/cer-2017-0019>.
- Alexander, W. Robert J. 2010. "Inflation and Economic Growth: Evidence from a Growth Equation." *Applied Economics* 29 (2): 233–238. <https://doi.org/10.1080/000368497327290>.
- Ampah, Isaac Kwesi, and Balázs Kotosz. 2018. "Wagner versus Keynes: The Causal Nexus between Government Expenditures and Economic Growth: An Empirical Study of Burkina Faso." *Journal of Heterodox Economics* 3 (2): 74–101. <https://doi.org/10.1515/jheec-2016-0005>.
- Attari, Muhammad Irfan Javaid, and Attiya Y. Javed. 2013. "Inflation, Economic Growth and Government Expenditure of Pakistan: 1980-2010." *Procedia Economics and Finance* 5 (13): 58–67.
- Bajo-Rubio, Oscar. 2000. "A Further Generalization of the Solow Growth Model: The Role of the Public Sector." *Economics Letters* 68 (1): 79–84. [https://doi.org/10.1016/s0165-1765\(00\)00220-2](https://doi.org/10.1016/s0165-1765(00)00220-2).
- Barro, Robert J. 1992. "Determinants Of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study." *Australian Journal of Entomology* 31 (3): 198–198. <https://doi.org/10.1111/j.1440-6055.1992.tb00482.x>.
- Behera, Jaganath. 2014. "Inflation and Its Impact on Economic Growth : Evidence from Six South Asian Countries." *Journal of Economics and Sustainable Development* 5 (7): 145–155.
- Bhanoji Rao. 2001. "East Asian Economies: Trends in Saving and Investment." *Economic and Political Weekly* 36 (13): 1123–1133. <http://www.jstor.org/stable/4410459>.
- BPS. 2018. *Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Carboni, Oliviero A., and Giuseppe Medda. 2011. "Government Spending and Growth in a Neoclassical Model." *Mathematics and Financial Economics* 4 (4): 269–285. <https://doi.org/10.1007/s11579-011-0045-2>.
- Charles R. NELSON, Charles I. PLOSSER. 1982. "Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: A Reappraisal." *Journal of Monetary Economics* 10: 139–62. <https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2011.10.001>.
- Chirwa, Themba G., and Nicholas M. Odhiambo. 2016. "Macroeconomic Determinants of Economic Growth: A Review of International Literature." *South East European Journal of Economics and Business* 11 (2): 33–47. <https://doi.org/10.1515/jeb-2016-0009>.
- . 2018. "Exogenous and Endogenous Growth Models: A Critical Review." *Comparative Economic Research* 21 (4): 63–84. <https://doi.org/10.2478/cer-2018-0027>.
- Daniel Francois Meyer, Tebogo Manete, and Paul-Francois Muzindutsi. 2017. "The Impact of Government Expenditure and Secgtoral Investment on Economic Growth in South Africa." *Journal of Advanced Research in Law and Economics* 28 (6). [https://doi.org/10.14505/jarle.v8.6\(28\).19](https://doi.org/10.14505/jarle.v8.6(28).19).
- Dogan, Ergun, and Tuck Cheong Tang. 2006. "Government Expenditure And National Income: Causality Tests For Five South East Asian Countries" 5 (10): 49–58.
- Dudzeviit, G., A. Liuvaitien, and A. Simelyt. 2017. "Government Expenditure and Economic Growth in the European Union Countries." *International Journal of Social Economics* 36 (36): 127–133.
- Dutt, Amitava Krishna. 2006. "Aggregate Demand, Aggregate Supply and Economic Growth." *International Review of Applied Economics* 20 (3): 319–336. <https://doi.org/10.1080/02692170600736094>.
- Emmanuel Nkoa Onggo, Andrew Wujung Vukengkeng, and Management Sciences. 2014. "Does Gross Capital Formation Matter for Economic Growth in the CEMAC Sub-Region?" *Euro Economica* 2 (2).
- Fedderke, J. W., and A. T. Romm. 2006. "Growth Impact and Determinants of Foreign Direct Investment into South Africa, 1956-2003." *Economic Modelling* 23 (5): 738–760. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2005.10.005>.
- Gujarati, Damodar N., and Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika. Buku 2 Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta*.
- Gujarati, Damodar N., and D.C. Porter. 2009. *Basic of Econometric. Econometrics*. Fifth Edit. McGraw-Hill Irwin Companies, New York. [https://doi.org/10.1007/978-1-137-37502-5\\_17](https://doi.org/10.1007/978-1-137-37502-5_17).
- Gunarto, Toto, Ahmad Sentri, and Muhammad Said. 2018. "Local Government Expenditures and Economic Growth in a New Autonomous in Indonesia." *Academy of Accounting and Financial Studies Journal* 22 (4): 1–16.
- Hartley, Peter R., and Joseph A. Whitt. 2003. "Macroeconomic Fluctuations: Demand or Supply, Permanent or Temporary?" *European Economic Review* 47 (1): 61–94. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(02\)00205-2](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(02)00205-2).
- Hussein, Jwan S, and James K A Benhin. 2014. "A Time Series Analysis of The Determinants of Domestic Private Investment In Iraq (1970-2010)." *International Journal of Arts & Sciences* 07 (02): 395–412.
- IMF. 2015. *Regional Economic Outlook Asia and Pacific 2011*.
- Kanayo, Ogujiuba. 2013. "The Impact of Human Capital Formation on Economic Growth in Nigeria." *Journal of Economics* 4 (2): 121–132. <https://doi.org/10.1080/09765239.2013.11884972>.
- Klenow, Peter J., and Benjamin A. Malin. 2010. *Microeconomic Evidence on Price-Setting. Handbook of Monetary Economics*. Vol. 3. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53238-1.00006-5>.
- Koutsoyiannis, A. 1977. *Theory of Econometrics: An Introductory Exposition of Econometric Method*. Second Edi. Macmillan Publishers, LTD.
- Kwok, Yun-kwong, and Yun-kwong Kwok. 2007. "To Save or to Consume : Linking Growth Theory with the Keynesian Model." *The Journal of Economic Education* 38 (1): 109–23. <https://doi.org/10.3200/JECE.38.1.109-123>.
- Laopodis, Nikiforos T. 2010. "Effects of Government Spending on Private Investment." *Applied Economics* 12 (33): 1563–1577. <https://doi.org/10.1080/00036840010011934>.
- Loizides, John, and George Vamvoukas. 2005. "Government Expenditure and Economic Growth: Evidence from

- Trivariate Causality Testing." *Journal of Applied Economics* VI (1): 125–52. <https://doi.org/DOI:> ,.
- Lorena Cakerri, Migena Petanaj, Oltiana Muharremi. 2014. "The Effect of Government Expenditures on Economic Growth. The Case of Albania." *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura* 18 (1): 1.
- Mankiw, N. Gregory. 2010. *Macroeconomics*. 7th Editio. Harvard University, USA.
- Mario Svirg, Josipa Milos. 2017. "Relationship Between Inflation and Economic Growth: Comparative Experience of Italy and Austria." *Fip* 5 (2): 91–102.
- Martin Zagler, Georg Durnecker. 2003. "Fiscal Policy and Economic Growth." *Journal of Economic Surveys* 17 (3): 397–418. <https://doi.org/10.1108/01443581111161841>.
- Maurice Obstfeld. 2016. "World Economic and Financial Survey." In . <https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/soint010416a>.
- Milesi-Ferretti, Gian Maria, and Nouriel Roubini. 1998. "On the Taxation of Human and Physical Capital in Models of Endogenous Growth." *Journal of Public Economics* 70 (2): 237–254.
- N. Gregory Mankiw, David Romer, David N. Weil. 1992. "A Contribution to the Empirics of Economic Growth." *The Quarterly Journal of Economics* 107 (May): 407–437.
- Nijkamp, Peter, and Jacques Poot. 2004. "Meta-Analysis of the Effect of Fiscal Policies on Long-Run Growth." *European Journal of Political Economy* 20 (1): 91–124. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2003.10.001>.
- Norashida Othman, Zulkornain Yusop, Gul Andaman, Mohd Mansor Ismail. 2018. "Impact of Government Spending on FDI Inflows: The Case of ASEAN-5, China and India." *International Journal of Business and Society* 19 (2): 401–14.
- Odhiambo, Nicholas M. 2015. "Government Expenditure and Economic Growth in South Africa: An Empirical Investigation." *Atlantic Economic Journal* 43 (3): 393–406. <https://doi.org/10.1007/s11293-015-9466-2>.
- Okoh, Gabriel Chukwu Nkechukwu; Johnson Ifeanyi. 2015. "Capital Expenditure at Disaggregated Level and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Analysis." *International Journal of Science and Research (IJSR)* 4 (6): 729–737.
- Olsson, Ola. 2010. *Essentials of Advanced Macroeconomic Theory*. 2010 editi. Cambridge, Massachusetts.
- Parkin, Michael. 2012. *Macroeconomics*. PEARSON Columbia University. [www.pearsonhighered.com](http://www.pearsonhighered.com).
- Próchniak, Mariusz. 2011. "Determinants of Economic Growth in Central and Eastern Europe: The Global Crisis Perspective." *Post-Communist Economies* 23 (4): 449–68. <https://doi.org/10.1080/14631377.2011.622566>.
- Raisová, Manuela, and Júlia Ďurčová. 2014. "Economic Growth-Supply and Demand Perspective." *Procedia Economics and Finance* 15 (14): 184–91. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00476-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00476-6).
- Richard T. Froyen. 2013. *Macroeconomics Theories and Policies*. Tenth. PEARSON Columbia University.
- Sasmal, Ritwik, and Joydeb Sasmal. 2016. "Public Expenditure, Economic Growth and Poverty Alleviation." *International Journal of Social Economics* 43 (6): 604–618. <https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2014-0161>.
- Seshaiah, S V, T Koti Reddy, and I R S Sarma. 2018. "General Government Expenditure and Economic Growth in India : 1980-81 to 2015-16." *Theoretical Economics Letters* 8: 728–740. <https://doi.org/10.4236/tel.2018.84050>.
- Shafuda, C.P. 2015. "An Examination of the Relationship Between Government Spending and Economic Growth in Namibia." *Thesis*, no. 1: 1–91.
- Sharipov, Ilkhom. 2016. "Exogenous vs Endogenous Growth in the Eu's Eap and Central Asian Countries." *Scientific Annals of Economics and Business* 63 (Specialissue2016): 109–24. <https://doi.org/10.1515/saeb-2016-0138>.
- Slemrod, Joel, William G. Gale, and William Easterly. 1995. "What Do Cross-Country Studies Teach about Government Involvement, Prosperity, and Economic Growth?" *Brookings Papers on Economic Activity* 1995 (2): 373.
- Solow, Robert M. 1956a. "A Contribution to the Theory of Economic Growth." *The Quarterly Journal of Economics* 70 (1): 65–94.
- Solow, Robert M. 1956b. "A Contribution To the Theory of Economic Growth." *Source: The Quarterly Journal of Economics* 70 (1): 65–94.
- Stephen Gitahi Njuru, et al. 2014. "Impact Of Government Expenditure On Private Investment In Kenya." *Research Journal's Journal of Economics* 2 (8): 1–19.
- Sunny Lbe O, Osuagwu Nathaniel C. 2016. "Impact of Capital Formation on the Economic Development of Nigeria." In *International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB16Chennai Conference)*, 1–9.
- UNDP. 2010. *What Will It Take To Achieve the Millennium Development Goals? An International Assessment*. Poverty Practice Group, New York, NY.
- Vinayagathan, Thanabalasingam. 2013. "Inflation and Economic Growth: A Dynamic Panel Threshold Analysis for Asian Economies." *Journal of Asian Economics* 26: 31–41. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2013.04.001>.
- W. Madurapperuma, M. 2016. "Impact of Inflation on Economic Growth in Sri Lanka." *Journal of World Economic Research* 5 (1): 1. <https://doi.org/10.11648/j.jwer.20160501.11>.
- Walter Nonneman and Patrick Vanhoudt. 1996. "A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for OECD Countries." *The Quarterly Journal of Economics* 111 (3): 943–53.
- World Bank. 2017. *Annual Report. World Bank Group*. World Bank Group.